

## ABSTRAK

Jesy Tasela, 2021. *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Aspek Sosial Budaya Di Kabupaten Indramayu.*

Saat ini Indonesia sedang mengalami kondisi kedaruratan kesehatan yang disebabkan oleh wabah virus covid-19 yang telah menyebar hingga keseluruhan penjuru negeri. Pada masa darurat, pemerintah daerah selaku penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah, dituntut hadir dalam penyelesaian permasalahan ini secara cepat dan tepat salahsatunya dengan mengeluarkan kebijakan serta peraturan baru. PSBB menjadi salahsatu upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus, namun kerap kali sebuah kebijakan menuai pro dan kontra seta dianggap telah mengubah tatanan sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui proses perencanaan Peraturan Bupati no 29/2020 tentang pedoman PSBB. *Kedua*, untuk mengetahui pelaksanaan dan evaluasi Peraturan Bupati no 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. *Ketiga*, untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep, yakni: 1). Teori Negara Hukum menurut Hans Kelsen. 2). Konsep Kedaruratan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. 3). Teori siyasah dusturiyah; Pemerintah dan rakyat, hak dan kewajiban rakyat dan kedaruratan perspektif islam.

Metodelogi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan logika. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan mengumpulkan data yang ada dilapangan serta menggunakan pendekatan yuridis empirik dan yuridis normative. Hasil dari penelitian kualitatif adalah mengolah data yang bersifat deskriptif, dengan melakukan wawancara dan observasi

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, perencanaan Peraturan Bupati nomor 29/2020 mempunyai maksud yaitu sebagai pedoman pelaksanaan PSBB di kabupaten Indramayu yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu, memperkuat penanganan kesehatan serta menangani dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. *Kedua*, pelaksanaan kebijakan PSBB diterapkan secara efektif dengan menerapkan sanksi administratif oleh pihak satpol pp dan satgas covid-19 dan evaluasi yang dilakukan pansus menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut masih belum efektif, terlihat pada saat pemberlakuan PSBB jumlah kasus dan sebaran kasus di Indramayu tetap meningkat. *Ketiga*, Berdasarkan kaidah fiqih, yang artinya “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”. Dalam kondisi darurat upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penyebaran wabah dapat digolongkan sebagai jihad/perang suci yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan rakyat.

**Kata kunci: PSBB, Peraturan Bupati , Siyasah Dusturiyah.**

